



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

HASIL PEMANTAUAN

HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024

Konsolidasi Pemantau Pemilu, 14 Februari 2024

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2024**

HASIL PEMANTAUAN

HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN UMUM 2024

Konsolidasi Pemantau Pemilu, 14 Februari 2024

Pemantau Pemilu terdaftar di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pemantauan bersama pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Konsolidasi pemantauan ini dilakukan di 1.571 Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh 2.082 Pemantau yang tersebar di 156 Kabupaten/Kota di 26 Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	TPS
1	Aceh	12	36
2	Banten	3	27
3	D.I Yogyakarta	1	9
4	DKI Jakarta	5	75
5	Bengkulu	1	17
6	Jambi	1	8
7	Jawa Barat	20	221
8	Jawa Tengah	20	473
9	Jawa Timur	13	105
10	Kalimantan Barat	1	12
11	Kalimantan Selatan	9	30
12	Kalimantan Tengah	10	50
13	Bangka Belitung	1	7
14	Kepulauan Riau	8	251
15	Lampung	1	14
16	Maluku	1	6
17	Maluku Utara	1	14
18	Nusa Tenggara Timur	1	9
19	Nusa Tenggara Barat	4	27
20	Papua	2	3
21	Riau	14	73
22	Sulawesi Tengah	1	8
23	Sulawesi Tenggara	1	6
24	Sulawesi Selatan	9	46
25	Sumatera Barat	7	21
26	Sumatera Utara	9	23
TOTAL		156	1.571

Terdapat 4 fokus pemantauan dengan 17 indikator sebagai instrumen yang digunakan untuk memastikan prosedur pemungutan suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mengumpulkan informasi terkait proses pemungutan dan penghitungan suara.

Empat fokus pemantauan yaitu 1) Logistik Pemungutan Suara dengan 4 indikator yaitu kelengkapan logistik pemungutan suara, pemasangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di papan pengumuman, adanya Alat Peraga Kampanye (APK) di sekitar TPS dan penghitungan surat suara sebelum pemungutan suara dimulai. 2) Proses Pemungutan Suara dengan 5 indikator yaitu pengawas TPS mendapatkan salinan DPT, Saksi mendapatkan salinan DPT, Kerahasiaan pemungutan suara, saran perbaikan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Penyampaian Keberatan dari Saksi ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Fokus pemantauan ke 3) Akses Penyandang Disabilitas dengan 4 indikator yaitu ketersediaan alat bantu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, ketersediaan alat bantu untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penandatanganan formulir pendampingan pemilih dan akses TPS bagi penyandang disabilitas dan 4) Penghitungan Suara dengan 4 indikator yaitu keterbukaan proses penghitungan suara, keberatan saksi saat penghitungan suara, adanya pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS dan adanya pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS.

Berdasarkan fokus dan indikator tersebut, hasil pemantauan menemukan informasi sebagai berikut.

1) Logistik Pemungutan Suara.

Dari 1.571 TPS yang dipantau terdapat 41 TPS (3 persen) yang mengalami kendala dalam melengkapi seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Kendala dalam perlengkapan pemungutan suara ini misalnya tidak adanya alat bantu bagi disabilitas, jumlah surat suara yang kurang sesuai dengan jumlah DPT, adanya kotak suara yang tertukar antar TPS dan kondisi banjir yang mengakibatkan pengiriman perlengkapan pemungutan suara tidak datang secara bersamaan.

Terdapat 51 TPS (3 persen) yang tidak memasang DPT di papan pengumuman atau tempat informasi di TPS. Tidak dipasangnya DPT disebabkan oleh ketersediaan ruang pengumuman yang tidak cukup sehingga hanya memprioritaskan informasi tentang calon presiden dan wakil presiden dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, takut basah karena kondisi hujan serta KPPS tidak mengetahui kalau salinan DPT perlu dipasang di papan pengumuman.



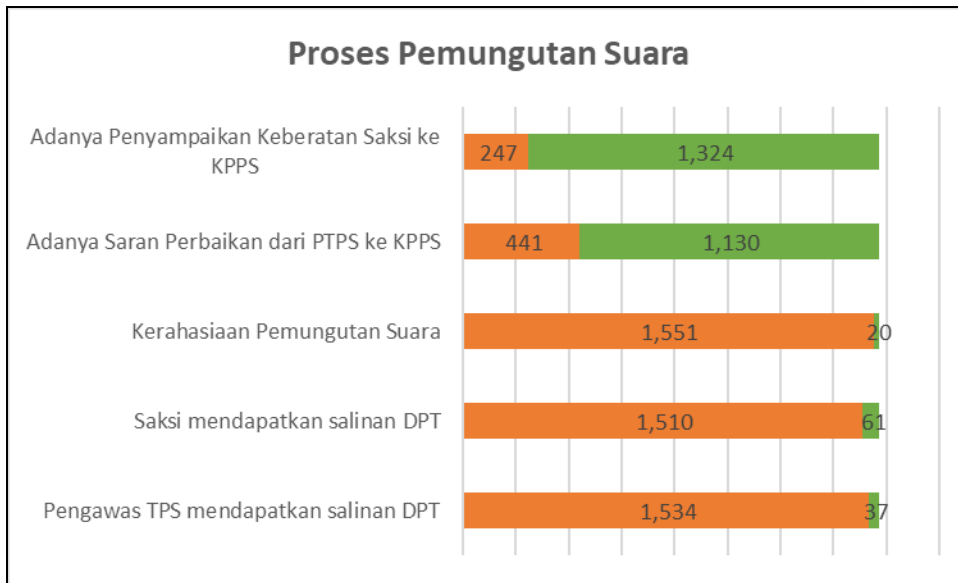
Terdapat 26 TPS (2 persen) yang dalam radius 100 meter masih terdapat APK yang terpasang atau tersebar di sekitar TPS. APK ini masih terpasang di rumah warga, menempel di tembok sekitar TPS dan menempel di kendaraan atau gerobak milik warga.

Sebelum pemungutan dimulai, terdapat 44 TPS (3 persen) yang tidak menghitung terhadap surat suara sesaat setelah mengeluarkan surat suara dari kotak suara sebelum dilakukan pemungutan. Tidak diperiksanya jumlah surat suara yang diterima dengan cara menghitung ulang ini karena pemungutan suara sudah masuk pada waktunya sehingga langsung dilakukan pemungutan suara.

2) Proses Pemungutan Suara

Dari 1.571 TPS, terdapat 37 TPS (2 persen) Pengawas TPS yang tidak mendapatkan salinan DPT. Tidak diberikannya salinan karena belum dicetak, salinan berada dalam kotak yang terendam banjir dan sudah terwakili dengan DPT yang dipasang di papan pengumuman. Demikian juga terdapat 61 TPS (4 persen) Saksi tidak mendapatkan salinan karena keterbatasan jumlah salinan, dianggap tidak perlu menerima salinan dan hanya mendapatkan salinan untuk DPTb.

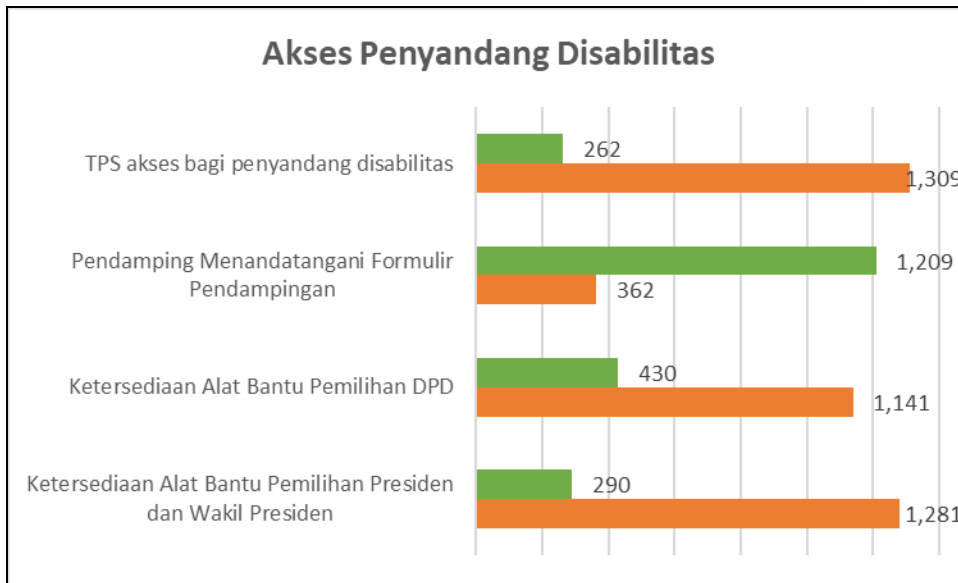
Terdapat 20 TPS (1 persen) proses pemungutan suara kurang menjamin kerahasiaan. Hal ini disebabkan oleh relokasi TPS karena kondisi hujan, jarak bilik dengan antrian yang terlalu dekat, lokasi KPPS bekerja dibelakang bilik suara dan adanya ruang terbuka dibelakang bilik dimana setiap orang bisa melaluinya.



Selama proses pemungutan berlangsung, terdapat 441 TPS (28 persen) dimana Pengawas TPS memberikan saran perbaikan dan 247 TPS (16 persen) Saksi menyampaikan keberatan saat pemungutan suara berlangsung. Saran perbaikan dan penyampaian keberatan ini terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai prosedur, keterlambatan dimulainya pemungutan suara, terkait dengan jumlah hitungan pemilihan presiden dan wakil presiden, tentang menambah volume pengeras suara, perbaikan layout TPS setelah direlokasi karena hujan, kotak suara yang wajib disegel sebelum pemungutan suara, pengecekan surat suara yang salah masuk kotak suara sesuai jenis pemilihan, ketertiban pemilih, adanya surat suara yang rusak dan hitungan yang kurang berdasarkan DPT, kategorisasi tentang DPT, DPTb dan DPK, pembagian tugas KPPS yang sesuai dengan peraturan, pemindahan papan informasi ke tempat yang lebih terbuka dan aman dari kondisi hujan, meletakkan HP sebelum pencoblosan, prosedur penghitungan suara sesuai ketentuan, ketentuan suara sah dan tidak sah dan perbaikan terhadap kesalahan penghitungan.

3) Akses Penyandang Disabilitas.

Dari 1.571 TPS, terdapat 290 TPS (18 persen) tidak ditemukan alat bantu bagi disabilitas netra bagi pemilihan presiden dan wakil presiden dan 430 TPS (27 persen) tidak ditemukan alat bantu disabilitas netra bagi pemilihan DPD. Tidak ditemukannya kedua alat bantu ini lebih disebabkan karena kurang pemahannya KPPS terhadap penggunaan alat bantu tersebut. Penyebab lainnya karena KPPS menganggap tidak ada pemilih disabilitas netra di TPS tersebut. Jumlah alat bantu disabilitas netra untuk DPD yang lebih banyak tidak ditemukan disebabkan karena alat bantu tersebut pertama kali disediakan pada Pemilu ini.



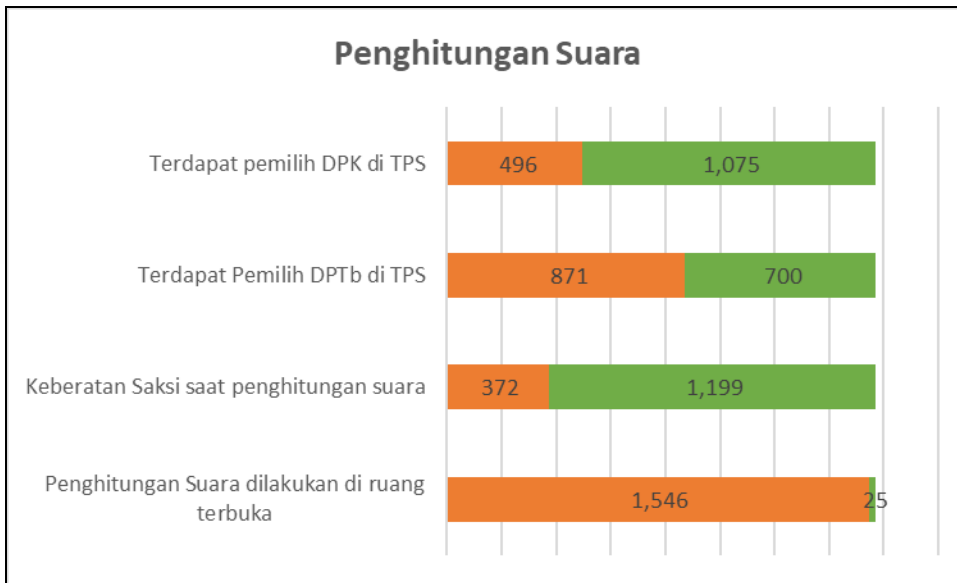
Terdapat 362 TPS (23 persen) pemilih yang dilakukan pendampingan tidak menandatangani formulir pendampingan pemilih. Proses pendampingan pemilih dilakukan persetujuan KPPS dan saksi dengan tidak menandatangani formulir pendampingan. Pendamping pemilih berasal dari keluarga atau orang dekat dari pemilih tersebut.

Berdasarkan indikator akses bagi penyandang disabilitas, terdapat 262 TPS (17 persen) yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas saat pemungutan dan penghitungan suara. Indikator kurang akses tersebut yaitu pintu yang sempit, dikelilingi oleh parit, terdapat tangga menuju TPS, tidak ditemukan alat bantu bagi disabilitas netra, TPS ada di lantai 2, terdapat undakan yang tinggi, terdapat selokan di pintu masuk, TPS berada di atas panggung dan terdapat genangan karena banjir.

4) Penghitungan Suara.

Dari 1.571 TPS, terdapat 25 TPS (2 persen) penghitungan suara dilakukan di ruang yang tidak cukup terbuka. Penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan tempat yang sempit sehingga tidak cukup ruang untuk disaksikan oleh orang banyak. Hal ini terutama terjadi di TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan dan TPS yang direlokasi karena kondisi hujan.

Terdapat 372 TPS (24 persen) terdapat keberatan saksi saat penghitungan suara. Penyampaian keberatan dari Saksi terkait dengan selisih surat suara yang digunakan, surat suara yang kurang, kategori sah dan tidak sah, kesalahan pengucapan nama saat penghitungan suara, terkait dengan pendampingan pemilih dan koreksi terkait jumlah hasil penghitungan suara.



Terdapat 871 TPS (55 persen) terdapat pemilih DPTb dan 496 TPS (32 persen) terdapat pemilih DPK. Hal ini menunjukkan pemilih banyaknya pemilih yang melakukan pindah memilih karena pindah lokasi dan pindah domisili. Kebijakan KPU yang memberlakukan pemilih DPTb yang pindah domisili menjadi DPK terwujud dalam banyaknya TPS yang dihadiri oleh pemilih dalam kategori pemilih khusus.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 1) Proses pemungutan dan penghitungan suara secara umum berjalan lancar dengan catatan-catatan yang dihasilkan dari pemantauan. Berdasarkan dari empat topik yang menjadi instrumen pemantauan, terdapat perlengkapan pemungutan suara yang mengalami kendala terutama di daerah yang turun hujan dan kondisi basah, pengetahuan dan ketrampilan penyelenggara saat pemungutan dan penghitungan suara yang tidak merata dan menjaga kerahasiaan pemilih yang kurang diperhatikan.
- 2) Adanya pemungutan suara lanjutan karena banjir dan kebijakan relokasi TPS karena hujan menunjukkan kurangnya daya antisipasi penyelenggara terhadap perubahan kondisi sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Pemetaan yang akurat terhadap lokasi TPS yang rawan tergenang kurang direncanakan dengan baik sehingga berdampak pada relokasi TPS saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Relokasi TPS mengakibatkan pembukaan TPS terlambat.
- 3) Adanya pilihan yang sifatnya rahasia dipublikasikan secara luas. Pemilih memberikan informasi tentang pilihannya melalui sarana publikasi misalnya media sosial dan *whatsapp grup* sehingga mengurangi aspek kerahasiaan. Kerahasiaan pemilih juga ditunjukkan dengan minimnya pendamping yang menandatangani formulir pendampingan saat mendampingi pemilih.
- 4) Proses perbaikan saat penghitungan suara. Adanya saran perbaikan yang dilakukan oleh Pengawas TPS dan penyampaian keberatan oleh Saksi saat penghitungan suara menunjukkan proses penyelesaian kesalahan saat penghitungan di TPS. Hal ini dapat mengurangi potensi kecurangan di tingkat TPS dan rekapitulasi tingkat berikutnya.

Perwakilan Pemantau :

1. Maliki Yusuf (GPM)
2. Baharudin Abdullah (LAKI)
3. Deni Sujana (LABAKI)
4. Deni Wahyudi (LSPI)
5. Angga Busra (ADP)
6. Farid Fathur (Media Keadilan Indonesia)
7. Deni Wahyudi (LSPI)

LAMPIRAN GRAFIK HASIL PEMANTAUAN

NO	KATEGORI	YA	%	TIDAK	%
A	Logistik Pemungutan Suara				
1	Kelengkapan Logistik Pemungutan Suara	1,530	97%	41	3%
2	Pemasangan DPT di Papan Pengumuman	1,520	97%	51	3%
3	Adanya APK dalam radius 100 meter di TPS	26	2%	1,545	98%
4	Perhitungan Surat Suara sebelum Pemungutan	1,527	97%	44	3%
B	Proses Pemungutan Suara				
1	Pengawas TPS mendapatkan salinan DPT	1,534	98%	37	2%
2	Saksi mendapatkan salinan DPT	1,510	96%	61	4%
3	Kerahasiaan Pemungutan Suara	1,551	99%	20	1%
4	Adanya Saran Perbaikan dari PTPS ke KPPS	441	28%	1,130	72%
5	Adanya Penyampaian Keberatan Saksi ke KPPS	247	16%	1,324	84%
C	Akses Penyandang Disabilitas				
1	Ketersediaan Alat Bantu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	1,281	82%	290	18%
2	Ketersediaan Alat Bantu Pemilihan DPD	1,141	73%	430	27%
3	Pendamping Menandatangani Formulir Pendampingan	362	23%	1,209	77%
4	TPS akses bagi penyandang disabilitas	1,309	83%	262	17%
D	Perhitungan Suara				
1	Perhitungan Suara dilakukan di ruang terbuka	1,546	98%	25	2%
2	Keberatan Saksi saat perhitungan suara	372	24%	1,199	76%
3	Terdapat Pemilih DPTB di TPS	871	55%	700	45%
4	Terdapat Pemilih DPK di TPS	496	32%	1,075	68%

**LAMPIRAN PEMANTAU PEMILU:
DAFTAR PESERTA**

a. Pemantau Nasional dan Luar Negeri (Partisipan Luring)

NO	LEMBAGA PEMANTAU NASIONAL
1.	Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat
2.	Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)
3.	Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)
4.	Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)
5.	Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih
6.	Netfid Indonesia
7.	Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI)
8.	Perludem
9.	Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
10.	Lembaga Studi Visi Nusantara
11.	Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
12.	KORPS HMI-WATI Pengurus Besar Himpunan Mahasiwa Islam (KOHATI PB HMI)
13.	Gerakan Mahasiswa Kristen Indoneisa (GMKI)
14.	Gerakan Mahasiswa Nasional Indoneisa (GMNI)
15.	PROGRESSIVE DEMOCRACY WATCH (PRODEWA)
16.	POROS SAHABAT NUSANTARA (POSNU)
17.	RUMAH PEMBERDAYAAN INDONESIA
18.	PIJAR KEDILAN
19.	Dewan Pimpinan Pusat Peduli Keadilan Rakyat (DPP PKR)
20.	KIPP INDONESIA
21.	PARWA INSTITUTE
22.	GERAKAN PEMUDA MARHAENIS
23.	KOPEL INDONESIA
24.	DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

25.	PMKRI
26.	FATA INSTITUTE
27.	JRDP (jaringan rakyat untuk demokrasi dan pemilu)
28.	LABAKI (laskar anak bangsa anti korupsi indoensia)
29.	FDM (forum demokrasi milenial)
30.	DEEP (Democracy and Electoral Empowertment Partnership)
31.	KISP (kOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU
32.	Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES)
33.	Asa Indonesia
34.	Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK JABAR)
35.	INDONESIA YOUTH EPI\\CENTRUM
36.	Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migrant (Migrant Care)
37.	Kata Rakyat
38.	Paham Indonesia
39.	LPP KAMMI
40.	Poros Anak Muda Sosia Politika
41.	Pelajar Islam Indonesia (PB PII)
42.	Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu (JMPP)
43.	Yasan Kemanusiaan Erihatu SaMasuru Lesuri Tapirone
44.	Yayasan Dewi Keadilan Indonesia
45.	Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG NASIONAL)
46.	Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD)
47.	Reclasseering Indonesia
48.	Jaga Pemilu
49.	FORUM KOMUNIKASI DEKAN FISIP /KETUA STISIP PTS SE INDONESIA (FK-DKISIP)
50.	IKAMI Sulawesi Selatan
51.	Cakra Wikara Indonesia

52.	Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP SURAK)
53.	SIGAB INDONESIA
54.	NILAM INSTITUTE
55.	PT. Media Keadilan Sejahtera
56.	Perkumpulan Pemantauan Pemilu KAI (Kongres Advokat Indonesia)
57.	Netgrid Indonesia
58.	Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI)
59.	Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI)
60.	Asosiasi Pengajar Politik dan Kebijakan
61.	PT. AKADEMI PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI INDONESIA
NO	LEMBAGA PEMANTAU LUAR NEGERI
62.	Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF)
63.	Asian Network for Free Election (ANFREL Foundation)
64.	Melanisian Spearhead Group (MSG)

b. Pemantau Provinsi (Partisipasi Daring)

NO	LEMBAGA PEMANTAU AKREDITASI PROVINSI	PROVINSI
65.	Kuala Musi Indonesia	Sumatera Selatan
66.	Lampung Democracy Studies	Lampung
67.	LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA (LIN) BENGKULU SELATAN	Bengkulu
68.	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Maluku	Maluku
69.	Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring (SulTra DeMo)	Sulawesi Tenggara
70.	The Aceh Institute	Aceh
71.	The Semeru institute	Jawa Timur
72.	Jaringan Edukasi Pemilu Untuk Rakyat Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur

73.	Universitas Internasional Batam	Kepulauan Riau
74.	Yayasan Penyuluhan Pelatihan dan Pendidikan Khatulistiwa (YP3K)	Kalimantan Barat
75.	Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
76.	Lingkar Studi Aksi Dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI)	Sulawesi Tengah
77.	Yayasan Peduli Lingkungan Swapraja (YPLS)	Sulawesi Selatan
78.	Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PBHI)	Sulawesi Selatan
79.	Malang Corruption Watch (MCW)	Jawa Timur
80.	Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP)	Sulawesi Selatan
81.	Pembela Rakyat (PERAK) Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
82.	Forum Masyarakat Peduli Jawa Timur	Jawa Timur
83.	Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
84.	Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
85.	LSM Jihat Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
86.	LBH Rumah Keadilan Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
87.	Relawan Sadar Politik, Univ. Muhammadiyah Palangka Raya	Kalimantan Tengah
88.	Perisai Demokrasi Bangsa	Jawa Tengah
89.	Lembaga Bantuan Hukum Mamba'ul Ulum	Jawa Tengah
90.	Swadaya Mitra Bangsa Sulawesi Selatan (YASMIB)	Sulawesi Selatan
91.	Aliansi Pemantauan Kinerja Aparatur Negara (APKAN)	Sulawesi Selatan
92.	Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK)	Sulawesi Barat
93.	Ilmu Politik Fisip UIN Sunan Gunung Jati	Jawa Barat
94.	Pusako Unand	Sumatera Barat

c. Pemantau Kabupaten/Kota (Partisipan Daring)

NO	LEMBAGA PEMANTAU AKREDITASI KAB/KOTA	PROVINSI	KAB/KOTA
93.	LPPN RI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia)	Aceh	Kab. Aceh Singkil
94.	Lembaga Investigasi Negara (LIN)	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan
95.	FORUM PEMBELA RAKYAT (FORPERA)	Jambi	Sarolangun
96.	MAPPILU PWI	Jatim	Malang
97.	FORSIS	Jatim	Malang
98.	LP-KPK	Jatim	Malang
99.	Kamus Institute	Jawa Barat	Kota Depok
100.	Forum Studi Bela Asasi Anak Dan Perempuan Indonesia	Jawa Barat	Kota Bekasi
101.	DPD KNPI KOTA BEKASI	Jawa Barat	Kota Bekasi
102.	Karang Taruna Kota Bekasi	Jawa Barat	Kota Bekasi
103.	Himpunan Wanita Disabilitas	Jawa Barat	Kota Bekasi
104.	RAMANGSA INSTITUTE	Jawa Barat	Kota Bekasi
105.	VOX POINT INDONESIA	Jawa Barat	Kota Bekasi
106.	Pemantau Elang Emas	Jawa Barat	Kabupaten Karawang
107.	Lembaga Kepemiluan Demokrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LKD PMII) Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka
108.	LBH JANUKA	Jawa Barat	Kota Bogor
109.	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)	Jawa Barat	Kabupaten Garut
110.	LSM Laskar NKRI	Jawa Barat	Kabupaten Bogor
111.	DPC PENJARA PN	Jawa Barat	Kabupaten Garut
112.	Forum Komunikasi Masyarakat	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya

	Tasikmalaya (FKMT)		
113.	LPRI LAMONGAN	Jawa Tengah	Lamongan
114.	Yayasan Jamiyah Al Buhus Wa An Nasyr	Jawa Tengah	Kabupaten Pati
115.	Yayasan Matahari Nusantara Bersinar	Jawa Tengah	Kabupaten Pati
116.	Yayasan Yudistira Nusantara Satu	Jawa Tengah	Kabupaten Pati
117.	Yayasan Pengging Najahul Farug	Jawa Tengah	Kabupaten Pati
118.	Yayasan Arsyah Abdi Sari	Jawa Tengah	Kabupaten Pati
119.	Yayasan Al-Hayyan Akbar Pati	Jawa Tengah	Kabupaten Pati
120.	Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia (FORKOMBI)	Jawa Tengah	Kabupaten Batang
121.	GERAKAN PEMUDA MARHAENIS	Jawa Tengah	Semarang
122.	Yayasan Harakah Nailul Barakah	Jawa Tengah	Kudus
123.	Yayasan Abdul Manan Ki Ageng Bantu	Jawa Tengah	Kudus
124.	LP-KPK (Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan)	Jawa Tengah	Temanggung
125.	LSM JIHAT (KABUPATEN BLITAR)	Jawa Timur	Kabupaten Blitar
126.	Lembaga Swadaya Masyarakat Jaring & Invertigasi Kejahatan Aparat	Jawa Timur	Kota Blitar
127.	Yayasan Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pasuruan	Jawa Timur	Kab.Pasuruan
128.	Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPPILU PWI)	Jawa Timur	Kabupaten Malang
129.	Forum Silaturahmi Santri	Jawa Timur	Kabupaten Malang
130.	Pengawas Independen Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR)	Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro
131.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FAKULTAS SYARIAH KABUPATEN PONOROGO	Jawa Timur	Ponorogo
132.	FORUM MASYARAKAT PEDULI	Jawa Timur	Kabupaten

	JAWA TIMUR (FMPJ)		Sidoarjo
133.	JARINGAN DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR	Jawa Timur	Kabupaten Kediri
134.	LEMBAGA PENGAWASAN REFORMASI INDONESIA (LPRI) DPD LAMONGAN	Jawa Timur	Lamongan
135.	YK2MP PASURUAN	Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan
136.	FORSIS	Jawa Timur	Malang
137.	Masyarakat dan Pemantau Pemilu (MAPPILU-PWI)	Jawa Timur	Kota Batu
138.	Jaringan Investasi Kejahatan Aparat	Jawa Timur	Kota Blitar
139.	KOALISI PEREMPUAN INDONESIA	Jawa Timur	Kabupaten Gresik
140.	PC PMII Probolinggo	Jawa Timur	Probolinggo
141.	Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu tingkat Daerah Lampung	Lampung	Bandar Lampung
142.	INDEPENDENT PUBLIC WATCH (IPW MALUKU TENGAH)	Maluku	Maluku Tengah
143.	Media Pemantau Suara Rakyat (MPSR)	Riau	Kab. Indragili Hilir
144.	Lembaga Mitra Keadilan Masyarakat (LMKM)	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pinrang
145.	Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang Kota Parepare	Sulawesi Selatan	Kota Parepare
146.	PENGURUS BESAR MAHASISWA ISLAM	Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros
147.	ANALIS PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGARA (APKAN)	Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros
148.	Lembaga Kerja Penelitian Publik	Sulawesi Selatan	Kabupaten Wajo
149.	LSM SAKTI	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu